STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KEMENTERIAN HUKUM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-90.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM,**  **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP 196610261990012001**
	NAMA SOP	**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenkumham; 3 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 4 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan.	1. Memahami konsep benturan kepentingan di lingkungan instansi pemerintah; 2. Mengetahui pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum; 3. Memahami prosedur pelaksanaan dan penyusunan laporan penanganan benturan kepentingan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pengendalian Gratifikasi	1. ATK 2. Internet 3. Komputer/Printer 4. Faximile
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, berpotensi menurunkan nilai reformasi birokrasi	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-90-OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA BPSDM	SEKRETARIS BPSDM	TIM KERJA PENGELOLAAN SDM	TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris untuk membentuk tim penanganan benturan kepentingan					Nota Dinas	1 jam	Disposisi	
2	Membentuk tim penanganan benturan kepentingan dan menugaskan Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk menyusun matriks indentifikasi					Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, dokumen kegiatan rapat pembentukan	1 hari	SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan	
3	Menyusun matriks identifikasi potensi benturan kepentingan dan rencana aksi penanganannya, dan melaporkan kepada Sekretaris					SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, dokumen kegiatan rapat penyusunan matriks identifikasi potensi dan rencana aksi penanganan benturan kepentingan	1 hari	Matriks Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Rencana Aksi Penanganan Benturan Kepentingan	
4	Mensosialisasikan kepada seluruh aparatur terkait kebijakan benturan kepentingan di lingkungan BPSDM Hukum					Matriks Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Rencana Aksi Penanganan Benturan Kepentingan	1 hari	Dokumen kegiatan sosialisasi dan Laporan	
5	Menyiapkan pakta integritas pernyataan benturan kepentingan untuk ditandatangani seluruh pegawai					Matriks Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Rencana Aksi Penanganan Benturan Kepentingan	5 hari	Dokumen Pakta Integritas Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	
6	Menerima pengaduan terkait benturan kepentingan					Dokumen Pakta Integritas Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan	1 hari	Dokumen pengaduan sebagai bahan monitoring dan evaluasi	
7	Melaksanakan rapat evaluasi penanganan benturan kepentingan					Dokumen pengaduan sebagai bahan monitoring dan evaluasi	1 hari	Dokumen kegiatan evaluasi penanganan benturan kepentingan, bahan rekomendasi	
7	Menyusun laporan monev penanganan benturan kepentingan per triwulan untuk dilaporkan kepada Sekretaris					Dokumen kegiatan evaluasi penanganan benturan kepentingan, bahan rekomendasi	5 hari	Laporan monev penanganan benturan kepentingan dan rekomendasi kebijakan	
8	Melaporkan hasil monev penanganan benturan kepentingan kepada Kepala BPSDM					Laporan monev penanganan benturan kepentingan dan rekomendasi kebijakan	1 hari	Laporan monev penanganan benturan kepentingan dan rekomendasi kebijakan	
9	Menerima laporan dan mengeluarkan kebijakan penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil rekomendasi Tim PBK					Laporan monev penanganan benturan kepentingan dan rekomendasi kebijakan	1 hari	Kebijakan untuk penanganan benturan kepentingan	

